

Pengaruh Implementasi *E-Budgeting*, *E-Procurement*, Komitmen Organisasi, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Empiris pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah)

Novika Ayu Wananda¹, Yohanes Joni Pambelum², Septa Soraida³

^{1,2,3} Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Indonesia

Alamat : Jalan H. Timang Palangka Raya Kalimantan Tengah

E-mail: nandaarbicaa@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the influence of e-budgeting implementation, eprocurement, organizational commitment, and transparency on public financial accountability in the regional government agencies of Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. The background of this research is based on the importance of public financial accountability in the era of government digitalization to enhance good regional financial governance. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires using a Likert scale, distributed to 72 respondents from 18 government agencies in Palangka Raya City, with each agency represented by 4 respondents. The results of the study show that e-budgeting has no significant effect on public financial accountability, while e-procurement and organizational commitment have a positive and significant effect on public financial accountability. Transparency, however, does not have a significant effect on public financial accountability. Nonetheless, simultaneously, e-budgeting, e-procurement, organizational commitment, and transparency have a significant effect on public financial accountability.*

Keywords: *E-Budgeting, E-Procurement, Organizational Commitment, Transparency, Public Financial Accountability.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-budgeting, eprocurement, komitmen organisasi, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan publik pada instansi pemerintah daerah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akuntabilitas keuangan publik di era digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala likert yang disebarakan kepada 72 responden dari 18 instansi pemerintah di Kota Palangka Raya, dengan masing-masing instansi diwakili oleh 4 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik, sedangkan e-procurement dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Namun, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Namun, secara simultan e-budgeting, e-procurement, komitmen organisasi, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik.

Kata Kunci: E-Budgeting, E-Procurement, Komitmen Organisasi, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik.

1. PENDAHULUAN

Reformasi di bidang keuangan daerah merupakan tuntutan era baru yang mendorong implementasi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu wujud reformasi ini adalah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diwajibkan sejak tahun 2015, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam konteks ini, teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement menjadi tulang punggung utama dalam mewujudkan sistem yang efisien dan transparan.

E-budgeting bertujuan menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan akurasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Prawitasari et al., 2023). Sementara itu, e-procurement mendorong efisiensi dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem berbasis digital (Vaidya et al., 2019). Kedua sistem ini saling melengkapi untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kinerja keuangan publik. Namun, efektivitas implementasi sistem tersebut tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal organisasi, seperti komitmen organisasi dan budaya transparansi (Gultom et al., 2024; Widyanti, 2018). Komitmen organisasi yang kuat mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja pegawai, serta memastikan bahwa sistem informasi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas (Trisnawati & Wiratmaja, 2018). Demikian pula, transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi keuangan secara luas dan menjadi bagian dari pengawasan sosial (Ikhsan, 2018).

Di Kota Palangka Raya, upaya peningkatan akuntabilitas terus dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian PAN-RB dalam evaluasi kinerja instansi daerah. Kota ini, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki posisi strategis dalam mengembangkan sistem tata kelola yang dapat menjadi model bagi daerah lain. Meskipun terdapat komitmen reformasi, masih ditemukan berbagai tantangan dalam penerapan sistem e-budgeting dan e-procurement serta dalam membangun budaya transparansi yang berkelanjutan (BPS Kota Palangka Raya, 2023; palangkaraya.go.id, 2025).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

- Teori Stewardship: Berasumsi bahwa pegawai publik bertindak sebagai pelayan kepentingan masyarakat, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi.
- Teori Keagenan: Menjelaskan hubungan principal-agent dalam organisasi publik, di mana masyarakat sebagai principal mengharapkan transparansi dari pemerintah sebagai agent.

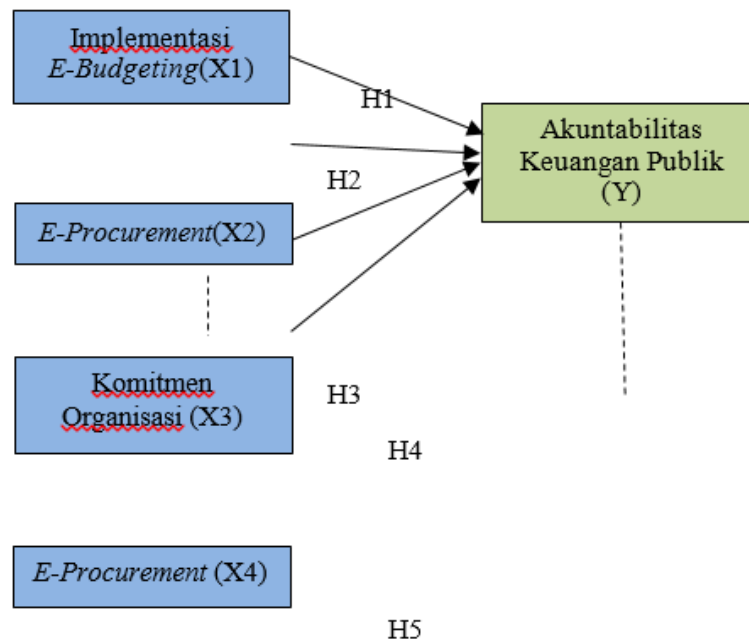
2.2 Konsep Variabel

- *E-Budgeting*: Menurut Supriyono R. A (2018), anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. *E-budgeting* merupakan aplikasi teknologi

informasi atau perangkat lunak untuk mendukung siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembuatan program, sampai dengan kendali dan evaluasi (Prawitasari, *et al.*, 2023).

- *E-Procurement*: *E-Procurement* menurut Wikipedia adalah pembelian *business-to-business* (B2B) dan penjualan barang/jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP).
- *Komitmen Organisasi*: *Komitmen organisasi* adalah sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, Samsuddin (2018).
- *Transparansi*: Widianti (2018) menyatakan, *Transparansi* adalah pelaksanaan tugas serta kegiatan yang bersifat transparan atau terbuka untuk masyarakat, dimulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
- *Akuntabilitas Keuangan Publik*: *Akuntabilitas publik* merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan (Halim, 2019).

2.3 Hubungan antar variable



Apakah Implementasi *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ?

1. Apakah Implementasi *E-Procurement* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ?
2. Apakah Implementasi Komitmen Organisasi positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ?
3. Apakah Implementasi Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ?
4. Apakah Implementasi *E-Budgeting*, *E-Procurement*, komitmen organisasi dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ?

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, karena data yang diolah berbentuk angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Menurut Sugiyono (2022), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dimana data ini merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Untuk

menentukan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan, digunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga dipilihlah yaitu 18 dinas pemerintah daerah Kota Palangka Raya yang menjadi populasi dan masing-masing dinas di ambil 4 responden sebagai sampel dalam penelitian ini.

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut sugiyono (2022) yang dimaksud analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.2 Uji Kualitas Data

3.2.1 Uji Validitas

Validitas, menurut Sugiyono (2022) menyatakan bahwa syarat minimum untuk suatu butir instrumen atau pernyataan dianggap valid adalah nilai indeks validitasnya positif dan besarnya 0,5 keatas.

1. Bila nilai r hitung $> r$ tabel = valid
2. Bila nilai r hitung $< r$ tabel = tidak valid

3.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2022). Apabila korelasi 0,7 atau lebih maka dikatakan 77 item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut Kurang reliabel.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem *e-budgeting*, *e-Procurement*, komitmen organisasi dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan publik pada dinas Pemerintah Daerah kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

3.3.2 Uji t

Menurut Ghozali (2021), uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat

3.3.3 Uji F

Menurut Ghozali (2021), uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat.

3.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021), uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen pada model secara bersama-sama (stimultan) dalam mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *R-Square*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1, nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai semakin mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	72	2.00	5.00	4.1250	.52908
X1.2	72	2.00	5.00	4.0278	.60450
X1.3	72	3.00	5.00	4.1528	.49390
X1.4	72	3.00	5.00	4.1528	.43313
X1.5	72	3.00	5.00	4.2222	.48126
X1.6	72	4.00	5.00	4.1806	.38735
X1.7	72	4.00	5.00	4.2222	.41866
<i>E-budgeting (X1)</i>	72	21.00	35.00	29.0833	2.90095
X2.1	72	3.00	5.00	4.1250	.47285
X2.2	72	1.00	5.00	4.0556	.57870
X2.3	72	2.00	5.00	4.0417	.56761
X2.4	72	3.00	5.00	4.1111	.46134
X2.5	72	3.00	5.00	4.1667	.50351
<i>E-Procurement (X2)</i>	72	15.00	25.00	20.5000	2.30126
X3.1	72	2.00	5.00	3.9306	.87736
X3.2	72	2.00	5.00	3.8333	.76912
X3.3	72	1.00	5.00	3.8889	.77923

X3.4	72	1.00	5.00	3.4861	.85569
X3.5	72	2.00	5.00	4.0000	.62799
X3.6	72	2.00	5.00	3.9583	.72067
Komitmen Organisasi (X3)	72	11.00	30.00	23.0972	3.99351
X4.1	72	2.00	5.00	3.6389	1.02511
X4.2	72	2.00	5.00	3.8333	.93447
X4.3	72	2.00	5.00	3.8333	.93447
X4.4	72	4.00	5.00	4.2778	.45105
X4.5	72	4.00	5.00	4.2778	.45105
X4.6	72	2.00	5.00	3.8333	.90383
X4.7	72	2.00	5.00	3.6250	1.09335
X4.8	72	2.00	5.00	3.8333	.90383
X4.9	72	2.00	5.00	3.5972	1.07021
Transparansi (X4)	72	22.00	45.00	34.7500	6.49539
Y1	72	4.00	5.00	4.4861	.50331
Y2	72	2.00	5.00	4.2639	.60498
Y3	72	3.00	5.00	4.2639	.47451
Y4	72	4.00	5.00	4.4444	.50039
Y5	72	4.00	5.00	4.3472	.47943
Y6	72	4.00	5.00	4.5000	.50351
Y7	72	4.00	5.00	4.5000	.50351
Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)	72	28.00	35.00	30.8056	2.73547
Valid N (listwise)	72				

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS Statistik Versi 25, 2025

a. E-Budgeting(X1)

Berdasarkan statistik deskriptif Variabel *E-budgeting* (X1), dari tabel di atas menunjukkan pola di mana indikator X1.1 dan X1.2 memiliki nilai minimum 2,00, sementara X1.3 hingga X1.5 memiliki nilai minimum 3,00, dan X1.6 serta X1.7 memiliki nilai minimum tertinggi yaitu 4,00. Dengan standar deviasi tertinggi pada indikator X1.2 (0,60450) dan rata-rata terendah pada X1.2 (4,0278).

b. E-Procurement (X2)

Berdasarkan statistik deskriptif Variabel *E-Procurement* (X2) dari tabel di atas menunjukkan pola Indikator X2.2 memiliki nilai minimum terendah yaitu 1,00. Standar deviasi tertinggi terdapat pada indikator X2.2 (0,57870) dan untuk rata-rata terendah terdapat di indikator X2.3 (4,0417).

c. Komitmen Organisasi (X3)

Berdasarkan statistik deskriptif Variabel Komitmen Organisasi (X3), dari tabel di atas menunjukkan adanya persepsi yang sangat beragam. Indikator X3.3 dan X3.4 memiliki

nilai minimum terendah yaitu 1,00, sementara indikator lainnya memiliki nilai minimum 2,00. Standar deviasi tertinggi terdapat pada indikator X3.1 (0,87736), sedangkan rata-rata terendah pada X3.4 (3,4861).

d. Transparansi.

Berdasarkan statistik deskriptif Variabel Transparansi (X4), dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai minimum 2,00, kecuali X4.4 dan X4.5 yang memiliki nilai minimum tertinggi yaitu 4,00. Indikator X4.7 memiliki standar deviasi tertinggi (1,09335), dan rata-rata terendah terdapat pada indikator X4.9 (3,5972).

e. Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan statistik deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan Publik (Y), dari tabel di atas menunjukkan nilai minimum indikator berada di kisaran 2,00 (Y2), 3,00 (Y3), dan lainnya pada 4,00. Standar deviasi tertinggi terdapat pada indikator Y2 (0,60498), sedangkan rata-rata terendah juga pada Y2 (4,2639).

4.2 Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>E-budgeting</i> (X1)	X1.1	0,865	0,2319	Valid
	X1.2	0,834	0,2319	Valid
	X1.3	0,935	0,2319	Valid
	X1.4	0,931	0,2319	Valid
	X1.5	0,915	0,2319	Valid
	X1.6	0,839	0,2319	Valid
	X1.7	0,738	0,2319	Valid
<i>E-Procurement</i> (X2)	X2.1	0,938	0,2319	Valid
	X2.2	0,846	0,2319	Valid
	X2.3	0,857	0,2319	Valid
	X2.4	0,942	0,2319	Valid
	X2.5	0,887	0,2319	Valid
Komitmen Organisasi (X3)	X3.1	0,862	0,2319	Valid
	X3.2	0,877	0,2319	Valid
	X3.3	0,918	0,2319	Valid
	X3.4	0,794	0,2319	Valid
	X3.5	0,887	0,2319	Valid
	X3.6	0,848	0,2319	Valid
Transparansi (X4)	X4.1	0,913	0,2319	Valid

	X4.2	0,875	0,2319	Valid
	X4.3	0,875	0,2319	Valid
	X4.4	0,519	0,2319	Valid
	X4.5	0,519	0,2319	Valid
	X4.6	0,809	0,2319	Valid
	X4.7	0,911	0,2319	Valid
	X4.8	0,809	0,2319	Valid
	X4.9	0,934	0,2319	Valid
Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)	Y1	0,857	0,2319	Valid
	Y2	0,585	0,2319	Valid
	Y3	0,789	0,2319	Valid
	Y4	0,805	0,2319	Valid
	Y5	0,729	0,2319	Valid
	Y6	0,746	0,2319	Valid
	Y7	0,890	0,2319	Valid

Sumber : Olah Data SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 2, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r hitung masing-masing item yang lebih besar daripada nilai r tabel, yaitu 0,2319. Nilai r tabel tersebut diperoleh berdasarkan jumlah responden sebanyak 72 orang, dengan derajat kebebasan (df) sebesar 70 dan tingkat signifikansi 5%. Uji validitas ini mencakup lima variabel penelitian yaitu *E-budgeting* (X1), *E-Procurement* (X2), Komitmen Organisasi (X3), Transparansi (X4) dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Y).

4.3 Hasil Uji Reabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Keterangan
<i>E-budgeting</i> (X1)	0,940	Reliabel
<i>E-Procurement</i> (X2)	0,932	Reliabel
Komitmen Organisasi (X3)	0,928	Reliabel
Transparansi (X4)	0,934	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)	0,881	Reliabel

Sumber : Olah Data SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan pada Tabel 4.3, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien alpha yang melebihi batas minimum reliabilitas yaitu 0,70. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya untuk digunakan dalam

pengumpulan data penelitian.

4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.639	2.549		6.921	.000		
	<i>E-budgeting</i> (X1)	-.248	.191	-.263	-1.297	.199	.207	4.833
	<i>E-Procurement</i> (X2)	.685	.227	.577	3.015	.004	.232	4.302
	Komitmen Organisasi (X3)	.334	.078	.487	4.286	.000	.658	1.520
	Transparansi (X4)	-.040	.049	-.094	-.810	.421	.629	1.591

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)

Sumber: Hasil pengolahan IBM SPSS Statistic, 2025

Berdasarkan hasil tabel koefisien regresi di atas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 17.639 - 0.248X_1 + 0.685X_2 + 0.334X_3 - 0.040X_4$$

Adapun arti dari koefisien regresi linear berganda tersebut adalah :

1. Konstanta sebesar 17.639

Artinya, jika variabel *E-budgeting* (X1), *E-Procurement* (X2), Komitmen Organisasi (X3), dan Transparansi (X4) bernilai 0, maka Akuntabilitas Keuangan Publik (Y) akan memiliki nilai sebesar 17.639. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari keempat variabel independen, Akuntabilitas Keuangan Publik berada pada posisi 17.639.

2. Koefisien regresi negatif variabel *E-budgeting* (X1) sebesar -0.248

Artinya, setiap peningkatan *E-budgeting* sebesar 1 satuan akan menurunkan Akuntabilitas Keuangan Publik sebesar 0.248, dengan asumsi variabel independen

lainnya tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan antara *E-budgeting* dan Akuntabilitas Keuangan Publik.

3. Koefisien regresi positif variabel *E-Procurement* (X2) sebesar 0.685

Artinya, setiap peningkatan *E-Procurement* sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik sebesar 0.685, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara *E-Procurement* dan Akuntabilitas Keuangan Publik.

4. Koefisien regresi positif variabel Komitmen Organisasi (X3) sebesar 0.334

Artinya, setiap peningkatan Komitmen Organisasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik sebesar 0.334, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah antara Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Keuangan Publik.

5. Koefisien regresi negatif variabel Transparansi (X4) sebesar -0.040

Artinya, setiap peningkatan Transparansi sebesar 1 satuan akan menurunkan Akuntabilitas Keuangan Publik sebesar 0.040, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bertanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan antara Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik.

4.5 Uji Statistik t

Berdasarkan tabel analisis regresi linear berganda pada table 4.4 di atas, hasil nilai uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh *E-budgeting* terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan hasil uji t, variabel *E-budgeting* (X1) memiliki nilai koefisien B sebesar -0.248 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.199 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-budgeting* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 yang menyatakan *E-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ditolak.

2. Pengaruh *E-Procurement* terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan hasil uji t, variabel *E-Procurement* (X2) memiliki nilai koefisien B sebesar 0.685 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.004, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 yang menyatakan *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik diterima.

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan hasil uji t, variabel Komitmen Organisasi (X3) memiliki nilai koefisien B sebesar 0.334 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 yang menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik diterima.

4. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan hasil uji t, variabel Transparansi (X4) memiliki nilai koefisien B sebesar -0.040 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.421 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 yang menyatakan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik ditolak.

4.6 Uji F

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228.734	4	57.183	12.664	.000 ^b
	Residual	302.544	67	4.516		
	Total	531.278	71			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)						
b. Predictors: (Constant), Transparansi (X4), Komitmen Organisasi (X3), <i>E-Procurement</i> (X2), <i>E-budgeting</i> (X1)						

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 12.664 dengan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas Keuangan Publik. Dengan kata lain, variabel *E-budgeting*, *E-Procurement*, Komitmen Organisasi dan Transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik. Sehingga, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *E-budgeting*, *E-Procurement*, Komitmen Organisasi, dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik diterima.

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	.431	.397	2.12499	1.856
a. Predictors: (Constant), Transparansi (X4), Komitmen Organisasi (X3), <i>E-Procurement</i> (X2), <i>E-budgeting</i> (X1)					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Publik (Y)					

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai *adjusted r square* sebesar 0.397 atau 39.7%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel *E-budgeting* (X1), *E-Procurement* (X2), Komitmen Organisasi (X3) dan Transparansi (X4) mampu menjelaskan atau mempengaruhi variasi Akuntabilitas Keuangan Publik (Y) sebesar 39.7%, sedangkan sisanya sebesar 60.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *E-budgeting* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-budgeting* yang masih bersifat teknokratis tanpa disertai perubahan fundamental dalam tata kelola dan budaya organisasi menyebabkan sistem ini belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara substansial. *E-budgeting* sangat bergantung pada komitmen organisasi, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan dalam penguatan system, peningkatan kapasitas SDM, integritas, tahapan terdokumentasi secara digital dan dapat diawasi secara *real-time* serta pengawasan yang konsisten agar manfaat dari *e-budgeting* dapat dioptimalkan secara berkelanjutan, agar tidak menjadi kendala utama yang menghalangi efektivitas *e-budgeting* dalam mendorong akuntabilitas keuangan publik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Sistem *e-Procurement* telah berhasil menciptakan transparansi yang lebih baik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform

elektronik yang memungkinkan seluruh tahapan pengadaan dapat diakses dan dipantau secara *real-time*. Keberhasilan *e-Procurement* didukung oleh fitur-fitur teknis yang memadai seperti *audit trail* yang lengkap, sistem notifikasi otomatis, dan integrasi dengan sistem keuangan lainnya yang memfasilitasi terciptanya proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Komitmen organisasi yang tinggi menciptakan budaya kerja yang mendukung implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sinergi antar unit kerja, pengurangan resistensi terhadap perubahan, dan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik menjadi manifestasi dari komitmen organisasi yang kuat dalam mendorong akuntabilitas keuangan publik. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Meskipun informasi keuangan telah dipublikasikan melalui berbagai media, namun transparansi yang bersifat pasif tanpa disertai mekanisme partisipasi publik yang efektif tidak mampu mendorong peningkatan akuntabilitas. Faktor-faktor seperti kompleksitas bahasa teknis dalam laporan keuangan, keterbatasan akses teknologi informasi di masyarakat, dan rendahnya literasi keuangan publik menjadi hambatan bagi efektivitas transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas. *E-budgeting*, *e-Procurement*, komitmen organisasi, dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Meskipun beberapa variabel tidak berpengaruh secara parsial, namun secara bersama-sama keempat variabel tersebut menciptakan sinergi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara sistem teknologi, budaya organisasi, dan mekanisme transparansi yang saling mendukung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya disarankan untuk terus mengoptimalkan implementasi *e-budgeting* dan *e-procurement* guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan komitmen organisasi, serta keterbukaan informasi kepada publik sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas

yang lebih baik. Evaluasi rutin terhadap system yang diterapkan juga perlu dilakukan agar kebijakan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada.

2. Bagi organisasi pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat penerapan system *e-budgeting* dan *e-procurement* guna menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Komitmen yang tinggi dari pimpinan hingga pelaksana sangat dibutuhkan untuk memastikan integritas dan efektivitas tata Kelola keuangan negara. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta keterbukaan informasi kepada public menjadi Langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Evaluasi dan perbaikan system secara berkala juga perlu dilakukan agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan wilayah studi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruh *e-budgeting*, *e-procurement*, komitmen organisasi, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan publik. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau system pengendalian internal untuk melihat faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam melalui penggabungan data kuantitatif dan kualitatif.

REFERENCES

- Adiwirya, M., & Sudana, I. P. (2015). *Accountability, transparency, and performance-based budgeting in Denpasar city regional work units*. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611-628.
- Aisy, R. R. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah).
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh E-Planning, *E-budgeting*, dan *E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 254-264.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). Kepemilikan manajerial dalam agency theory.

- Desa, P. D., & Susanti, N. A. M. (2023). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209-227.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33-42.
- Hadianto, A. W. (2022). Dampak Penggunaan *E-Procurement*, Akuntabilitas, Kompetensi dan Kompensasi pada Kinerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 5).
- Halim, V., Butar-Butar, M., Susanto, J., Adhitya, S., Cutiara, J., & Gultom, R. (2024). Pengaruh Penetapan Harga, Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Tuahta Maju Ersada. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4287-4295.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419-433.
- Hormati, A., Bayan, A., & Djaelani, Y. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Sistem Pelaporan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 8(1).
- Indrayani, L. F., Diatmika, I. P. G., SE, A., Si, M., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Junedah, L. (2019). *Pengaruh Maturitas Spip, Kapabilitas Apip, Serta Implementasi E-Planning Dan Ebudgeting Terhadap Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Kurnia, M. R. (2022). *Pengaruh Implementasi E-Budgeting Dan E-Office Terhadap Tingkat Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Asn Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).

- Maulidhia, J. P. (2020). *Faktor-Faktor Sukses Penerapan E-Government Pada Grms (Government Resources Management System) Di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49-59.
- Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia. In *Central and local government relations in Asia* (pp. 276-305). Edward Elgar Publishing.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1).
- Nurmandi, A., & Kim, S. (2015). Making *e-Procurement* work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities. *International Journal of Public Sector Management*, 28(3), 198-220.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten bantul. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2019). Pengaruh Implementasi *E-budgeting* dan *E-Procurement* Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23(1), 9-19.
- Prawitasari, P. P., Puspawati, A. A. A. I., Dewi, N. K. A. K., & Sariyani, N. L. P. (2023). Penyuluhan Dan Training Penyusunan Anggaran Demi Peningkatan Skill Netra Pertuni Bali. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 11185-11190.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publikdan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Puspitawati, L. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*.
- Rahardjo, S., Bijaksana, G., Larasati, K., Chamsudi, D. H. M., Sitorus, P. P., & Kania, D. D. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 2(2), 82-90.
- Ratiko, B. (2022). *Pengaruh Transparansi Dan E-Procurement Terhadap Fungsi Sistem Pengendalian Internal Dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Survei*

- Pada OPD Provinsi Banten*) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta).
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD (Studi persepsi pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 89-101.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110-117.
- Yuniarti, D. S., Sukomo, S., & Prawiranegara, B. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Budgeting* Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Suatu Studi pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ciamis).
- <https://palangkaraya.go.id/evaluasi-akuntabilitas-kinerja-bagi-pemerintah-kota-palangkaraya/>, diakses pada 8 April 2025